

DAFTAR PUSTAKA

- Risma Hafid, 2016. *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep*, Skripsi : Universitas Hasanudin Makassar.
- Ni"matul Huda, 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, Skripsi : Fakultas Hukum UII Press.
- Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia Sembiring, 2018. *Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)*, Jurnal : Integritas Vol. 4 Nomor 1, Malang.
- Hadari Nawawi, 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press.
- Nurus Zuriah, 2006. *Metode penelitian Sosial dan Pendidikan, Toeri dan Peraktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Lexy J Moleong, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Surayin, 2012. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : Yrama Widya.
- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Amir Ilyas, 2014. *Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang*, Yogyakarta : Education.
- Evi Hartanti, 2005 *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kartini Kartono, 2003. *Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya Fajar Mulia.
- R. Wiyono, 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- Robertus Dicky Armando, Gde Made Swardana, Sagung Putri M.E. Purwani, Analisa Yuridis Tetang Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jurnal : Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ida Syafriyani, 2014. *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan (Studi Akselerasi Percepatan Pembangunan Desa)*. Jurnal : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Sumenep.
- Panjaitan. *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan* Jurnal : IU Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Vol 24 , No 3, Juli, 2017.
- Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2, 3 dan 4

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 8

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 26 dan Pasal 27

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 12

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Masyarakat Transparansi Indonesia, <http://www.transparansi.ot.id>

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/333/5/101803020_file%205.pdf

http://digilib.uin-suka.ac.id/36017/1/15340035_BAB-I_IV-ATAU-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html>

<http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html>

<http://eprints.umm.ac.id/38726/3/BAB%20II%20.pdf>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa